

DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Agis Fitria Cahyani, "Potensi Penyimpangan Izin Usaha Pertambangan Ormas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Potential Irregularities Of Public Organizations' Mining Business Licenses In Government Regulation No 25 Of 2024", Vol 4 Nomor 11, 2023.
- Agus Santoso, A. P., dkk, Hukum Tata Usaha Negara: Suatu Implementasi Administrasi Negara dalam Tata Negara, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021)
- Franky Butar Butar, et.al, Pengantar Hukum: Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Surabaya: Airlangga University Press, 2022)
- Haris Oheo K, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintah yang Baik) dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan", Jurnal Yuridika, Vol 30 No. 1, 2015
- Iswadi Amiruddin, dkk, "Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Di Kabupaten Kolaka", Vol 1 No, 1 2020.
- Kementerian ESDM "Daftar Perusahaan Hasil Penataan IUP dan IUPK yang Memenuhi Ketentuan", <https://modi.esdm.go.id/portal/dataPerusahaan>, diakses pada 20 November 2024.
- Kontributor Niaga.Asia "Pansus Desak Perusahaan Tambang di Kaltim Laksanakan Reklamasi". <https://www.niaga.asia/pansus-desak-perusahaan-tambang-di-kaltim-laksanakan-reklamasi/>, diakses pada 20 November 2024.
- Krismiarsi, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual (Demak: Pustaka Magister, 2018)
- Nani Mulyati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Nazaruddin Lathif, "Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara", Jurnal Panorama Hukum 2, Vol 2 No. 2, 2017
- Muhammad Rizal Fadil, "Izin Usaha Pertambangan", Skripsi, Palembang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, 2019
- Mulyati N. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Depok: Rajawali Pers, 2018)

- Rheannen Cariena, dkk, Aspek Hukum Administrasi Negara Terhadap Pertambangan Illegal Pada Masa Covid-19: Studi Kasus Gunung Botak, *Prosiding Seri Seminar Nasional*, Vol. 2 No. 1, 2022
- Riswandi, Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa), Skripsi. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar, 2016
- Sari Murti Widiyastuti. Asas-asas Pertanggungjawaban Perdata. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Oheo Kaimuddin Haris, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang Berimplikasi Kerusakan Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 181/Pid.B/LH/2022/PN. Unh), Halu Oleo Legal Research, Vol 5 Nomor 1, 2023.
- Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Zen Lutfullloh, dkk, "Akibat Hukum Penerbitan Surat Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada kekayaan alam kepulauan sangihe", Vol 47, No. 2, 2021.